

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang paling menonjol atau menjadi komoditi andalan dari Kepulauan Bangka Belitung adalah timah, lada, dan karet. Berbicara timah, Bangka Belitung merupakan daerah pengekspor timah dalam jumlah yang sangat besar. Menurut Sutedjo dalam Zulkarnain, dkk (2005: 35), timah Bangka sudah masuk ke pasar Eropa, dimana tercatat 83% timah Bangka memasuki pasar Amsterdam pada tahun 1847, dan pernah terjadi Bangka memasok 25% kebutuhan timah Eropa.

Pada beberapa tahun yang lalu timah sangat berjaya. Timah menjadi primadona ketika harga lada menurun drastis. Dengan harga yang tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih cepat membuat banyak masyarakat beralih profesi dari pekebun lada menjadi penambang timah. Peralatan yang dibutuhkan pun bisa bervariasi, mulai dari peralatan manual dan ayakan saja, sampai mengeluarkan modal untuk pengadaan peralatan TI (tambang inkonvensional) yang bekisar 5-40 juta, tergantung skala yang diinginkan (Laporan BI Cab. Palembang dalam Ibrahim, 2013: 63).

Pertambangan timah memberikan dampak positif bagi perekonomian di Bangka Belitung, seperti masyarakat telah mampu untuk membuat rumah permanen, membeli kendaraan, serta tingginya permintaan barang yang ada di pasar. Selain dampak positif, pertambangan timah ternyata memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat. Pertambangan memang berdampak bagi perekonomian daerah sebagai akibat perputaran uang, namun fenomena sosial seperti pelacuran, budaya konsumtif, eksploitasi anak, dan fenomena lingkungan menjadi warna baru yang tak terhindarkan (Rahman dalam Ibrahim, 2013: 10).

Dampak dari pertambangan tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, namun juga berdampak pada lingkungan. Pertambangan timah di darat mengakibatkan air sungai menjadi keruh akibat pertambangan. Ada 10 sungai utama di Pulau Bangka yang tercemar, akibatnya krisis air dan berkurangnya habitat air menjadi dampak yang tidak terhindarkan (Ibrahim, 2013: 73).

Kerusakan hutan yang semakin parah, serta berkurangnya lahan perkebunan dan pertanian menjadi dampak lainnya bagi kondisi lingkungan akibat pertambangan. Lobang-lobang yang ditinggalkan menjadi tempat sarang nyamuk yang akan menebarkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Pertambangan tidak hanya dilakukan di daratan, namun telah merambah ke perairan laut. Di pesisir pantai dan daerah laut, mulai tahun 2004 pertambangan diramaikan oleh aktivitas TI

(tambang inkonvensional) apung yang menggunakan peralatan teknologi rakitan sederhana. Tahun 2009 muncul berbagai perusahaan mulai melakukan eksplorasi dengan menggunakan kapal yang populer di masyarakat dengan nama kapal isap (Ibrahim 2013: 61).

Dalam kegiatan pertambangan, masyarakat maupun perusahaan seharusnya mengikuti peraturan yang telah diatur didalam UU NO. 4 Tahun 2009 tentang wilayah pertambangan, dimana pada pasal 10 dikatakan bahwa untuk membuka wilayah pertambangan maka harus dilakukan secara transparan; partisipatif; bertanggung jawab; dilakukan terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah (Supramono, 2012: 278). Untuk membuka wilayah pertambangan timah maka harus memperhatikan hal-hal di atas, agar pertambangan tersebut bisa bermanfaat dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Dengan kondisi lahan di daratan yang semakin hari semakin minim nyatanya membuat kegiatan pertambangan telah merambah ke daerah perairan laut.

Kondisi ini diperparah dengan adanya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 pasal 37 tentang izin usaha pertambangan yang memberikan wewenang kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mengeluarkan izin pertambangan. Pertambangan lepas pantai, gubernur memberi izin untuk wilayah 4 sampai 12 mil dari garis pantai, sementara bupati/walikota

kurang dari 4 mil. Undang-undang ini menjadi pintu masuk yang baik bagi legalitas operasional kapal isap yang kini marak berkembang (Ibrahim, 2013: 61).

Dampak pertambangan yang dilakukan di laut tidak kalah parahnya, selain bibir pantai yang mudah terancam abrasi, kerusakan laut juga menjadi signifikan (Ibrahim, 2013: 74). Di daerah Teluk Limau Kecamatan Parit Tiga Bangka Barat, Christina (2011) mengatakan bahwa ada beberapa kapal isap yang telah beroperasi di perairan Teluk Limau. Seperti halnya di perairan Pantai Matras, perusahaan juga berusaha untuk melakukan kegiatan penambangan.

Perairan Pantai Matras merupakan lokasi tangkapan nelayan tradisional serta memiliki beberapa pantai sebagai destinasi wisata yang ada di Kecamatan Sungailiat. Kawasan perairan Pantai Matras diprediksi memiliki timah yang hasilnya sangat menggiurkan bagi para perusahaan tambang. Beberapa waktu yang lalu tepatnya awal tahun 2015 muncul isu akan masuknya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras. Pada tanggal 29 Desember 2015 lalu, masyarakat Matras melakukan unjuk rasa aksi damai di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas ketidaksetujuan mereka tentang isu masuknya kapal isap produksi di daerah mereka. Menurut Stern et al dalam Gunawan, dkk (2015: 68), salah satu karakteristik gerakan sosial adalah pertentangan antara kepentingan rakyat melawan kepentingan kelompok elit atau negara. Selain masyarakat Matras, penolakan terhadap kapal isap tersebut juga diikuti oleh

masyarakat di luar Kelurahan Matras. Seperti yang diungkapkan Tarrow dalam Gunawan, dkk (2015: 68), untuk menghadapi kekuatan elit, gerakan sosial menekankan pada kekuatan solidaritas di kalangan partisipan baik di kalangan internal maupun dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan sama.

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk gerakan sosial yang berusaha untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam menolak maupun mendukung suatu kebijakan. Macionis dalam Sukmana (2016: 4), menyatakan gerakan sosial adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Selain melakukan unjuk rasa, masyarakat juga membuat spanduk yang berisikan aspirasi mereka yang menolak masuknya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras. Spanduk penolakan tersebut mereka pasang di perempatan lampu merah dan gerbang pintu masuk Pantai Matras.

Bagaimana proses terjadinya gerakan tersebut, sehingga masyarakat bisa dengan tanggap menolak isu masuknya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras. Lalu bagaimana mobilisasi sumberdaya dalam gerakan masyarakat anti kapal isap produksi di perairan Pantai Matras. Fokus dalam penelitian ini akan membahas mengenai gerakan masyarakat anti kapal isap produksi di perairan Pantai Matras. Keterangan penulisan kapal isap produksi pada penulisan berikutnya akan penulis singkat menjadi KIP. Demikian gagasan dasar penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya gerakan penolakan terhadap masuknya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras?
2. Bagaimana mobilisasi sumberdaya yang ada dalam gerakan masyarakat anti kapal isap produksi di perairan Pantai Matras?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya gerakan penolakan terhadap masuknya kapal isap produksi di perairan Pantai Matras.
2. Untuk mengetahui proses mobilisasi sumberdaya yang ada dalam gerakan masyarakat anti kapal isap produksi di perairan Pantai Matras.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara akademis terutama di dalam perkembangan ilmu sosiologi terkait gerakan sosial yang lahir dari masyarakat.

## 2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem kelautan demi keberlangsungan hidup nelayan dan keindahan pantai.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya mengenai tema yang sama.

## E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa hasil penelitian yang berkenaan dengan gerakan sosial yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka penelitian ini. Tinjauan pustaka adalah Penelaahan pustaka berisikan penjelasan singkat tentang hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah, baik yang mendukung maupun yang bertentangan dengan pendapat peneliti (Usman, dan Purnomo, 2009). Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang penulis gunakan, yaitu:

Tulisan Merry Christina (2011) yang berjudul “*Gerakan Sosial Terhadap Keberadaan Kapal Isap Oleh Komunitas Nelayan Desa Teluk Limau Kecamatan Parit Tiga Bangka Barat*”. Didalam penulisannya, Merry membahas mengenai gerakan sosial dari akar rumput yang menolak kapal isap beroperasi di daerah Teluk Limau, karena Desa Teluk Limau

mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan sehingga bergantung terhadap sumberdaya laut. Sebuah pembuktian bahwa gerakan yang didukung oleh masyarakat akan mampu mempengaruhi kebijakan publik, karena rakyat sangat berperan besar dalam membawa perubahan.

Gerakan penolakan kapal isap oleh komunitas nelayan ini muncul karena adanya konflik yang selama ini mengakar dalam masyarakat Teluk Limau dan kemudian konflik tersebut muncul kepermukaan. Konflik-konflik kecil ini menghantarkan letupan-letupan gerakan sehingga aksi yang dilakukan oleh masyarakat kontra kapal isap ini merupakan sebuah gerakan sosial yang terus berlanjut. Konflik tersebut antara lain konflik perebutan sumberdaya, konflik kapitalis, konflik karena faktor lingkungan dan faktor kecemburuan sosial. Gerakan sosial penolakan ini terus berkembang sehingga melahirkan gerakan sosial tahan I, tahap II, dan tahap III. Hasil akhir dari gerakan sosial ini melahirkan konsesus yang mana kesempatan ini menjadi sebuah kebijakan.

Berdasarkan penulisan di atas, ada kesamaan dan perbedaan antara tulisan Merry dengan penelitian yang penulis tulis. Persamaan dari tulisan Merry dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gerakan masyarakat menolak kapal isap. Adapun perbedaan dari tulisan Merry dengan penelitian penulis yaitu, Merry hanya melibatkan sedikit pihak yaitu nelayan saja, sedangkan pada penelitian penulis melibatkan banyak pihak. Perbedaan lainnya adalah, tulisan Merry membahas penolakan kapal isap yang telah beroperasi di Teluk Limau, sedangkan di

dalam penelitian penulis gerakan sosial terjadi karena munculnya isu akan masuknya KIP di perairan Pantai Matras, serta lokus dari penelitian Merry dan penulis jelas-jelas berbeda.

Selanjutnya tulisan kedua dilakukan oleh Eko Cahyo, dalam jurnalnya yang berjudul "*Gerakan Anti Pembakaran Timah (Studi Kasus Gerakan Sosial Pada Masyarakat Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Dalam Menolak Aktivitas Pembakaran Timah)*". Krisis lingkungan yang diakibatkan oleh industri tidak ramah lingkungan telah merambah daerah yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan industri. Eko mengatakan Lamongan memiliki permasalahan lingkungan yang cukup serius yaitu berupa pencemaran atau polusi udara yang diakibatkan oleh asap timah. Asap timah muncul akibat hasil pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha peleburan timah di Kecamatan Pucuk, yang mana daerah tersebut berbatasan langsung dengan Kecamatan Sekaran. Hasil pembakaran berupa polusi asap timah sering mengarah ke wilayah Sekaran yang dianggap mengganggu kesehatan dan kualitas udara di wilayah tersebut.

Berdasarkan penulisan di atas, ada kesamaan dan perbedaan antara tulisan Eko dengan penelitian yang penulis tulis. Persamaan dari tulisan Eko dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitiannya sama-sama menggunakan teori mobilisasi sumberdaya untuk menganalisis permasalahan dan sama-sama menolak suatu kebijakan. Adapun perbedaan dari tulisan Eko dengan penelitian penulis yaitu, penulisan Eko

membahas mengenai gerakan masyarakat dalam menolak aktivitas pembakaran timah, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penolakan masuknya KIP.

Penulisan terakhir dilakukan oleh Wahyu Gunawan, dkk (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “*Institusionalisasi Gerakan Lingkungan Dalam Menentang Rencana PLTSa (pembangkit listrik tenaga sampah) Di Kota Bandung*”. Pembangunan PLTSa merupakan program pemkot Bandung dalam mengatasi masalah sampah. Di dalam jurnalnya Wahyu Gunawan, dkk mengatakan konsep PLTSa sebenarnya sederhana, yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik yang melibatkan proses pembakaran. Namun konsep ini dianggap membawa dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Rencana pembangunan PLTSa yang menggunakan teknologi *incinerator* tersebut diprotes oleh masyarakat, karena proses pembakaran sampah tersebut akan menghasilkan polusi udara yang mengancam kesehatan penduduk.

Dalam hasil penelitian Wahyu Gunawan, dkk menunjukkan bahwa institusionalisasi kelompok aktivis setelah bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar telah mengubah pendekatan gerakan. Melalui LPTT-BGC, upaya-upaya gerakan lebih diarahkan pada penyelamatan kondisi lingkungan yang ada melalui program edukasi masyarakat dan melakukan kerjasama selektif dengan pemerintah dan swasta dengan memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya seperti jejaring gerakan, media massa, dan partisipan yang massif.

Berdasarkan penulisan di atas, ada kesamaan dan perbedaan antara tulisan Wahyu Gunawan, dkk dengan penelitian yang penulis tulis. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai gerakan penolakan yang akan berdampak pada lingkungan. Adapun perbedaan dari tulisan Wahyu Gunawan, dkk dengan penelitian penulis yaitu, Wahyu fokus pada pertentangan pembangunan PLTSa, sedangkan penulis fokus pada penolakan KIP. Dari ketiga literatur yang telah di-*review*, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

#### **F. Kerangka Teoretis**

Gerakan sosial merupakan salah satu upaya dalam melakukan suatu perubahan. Ada beberapa definisi gerakan sosial menurut beberapa tokoh. Menurut Giddens dalam Suharko (2006: 3), gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Gerakan sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi kampanye bersama (Triwibowo, 2006: XV). John D.McCarthy dan Mayer Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya terorganisasi untuk

mengadakan perubahan didalam distribusi hal-hal apapun yang bernilai rasional (Wictorowicz dalam Cahyo, eko).

Untuk menganalisis proses dan sumberdaya yang digunakan dalam gerakan sosial terhadap penolakan KIP di perairan Pantai Matras, penulis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya sebagai pisau analisis. Tokoh teori mobilisasi sumberdaya ini adalah John D.McCarthy dan Mayer Zald. Teori mobilisasi sumberdaya merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif (Buechler dalam Sukmana, 2016: 154).

McCarty mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial (Situmorang, 2007: 7). Teori mobilisasi sumberdaya memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Teori mobilisasi berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial (Situmorang, 2007: 12).

Gerakan sosial terbangun ketika beragam aktor yang berbeda, baik individu, kelompok informal, dan organisasi formal bersama-sama mengelaborasi identitas kolektif mereka sebagai pihak yang berada dalam sisi yang sama terhadap suatu relasi konfliktual, baik melalui komunikasi maupun aksi kolektif bersama (Diana dan Nash dalam Triwibowo, 2006: 12). Aktor-aktor yang beroperasi bukan karena

kepentingan kelas mereka, tetapi mereka berjuang demi kepentingan kemanusiaan (Singh, 2010: 132). Teori mobilisasi sumberdaya menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural, seperti ketersediaan sumberdaya untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Para partisipan secara hati-hati memutuskan apakah ikut atau tidak ikut terlibat dalam suatu gerakan (Sukmana, 2016: 2). Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi (Klandermans dalam Sukmana, 2016: 155).

Ada empat tahapan dalam proses pergerakan sosial menurut Macionis dalam Sukmana (2016: 26) yaitu sebagai berikut:

1. *Emergence* (tahap kemunculan)

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik atau gerakan yang lainnya muncul sebagai kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil tentang beberapa isu tertentu.

2. *Coalescence* (tahap penggabungan)

Setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk menuju publik. Pemimpin harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru.

Dalam tahap ini, gerakan mungkin terlibat dalam tindakan kolektif untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik yang dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan.

3. *Bureaucratization* (tahap birokratisasi)

Gerakan sosial harus memiliki sifat birokrasi. Dengan demikian, gerakan akan menjadi mapan, ketergantungan terhadap kharisma pemimpin akan sedikit menurun karena akan digantikan oleh staf yang mumpuni. Apabila suatu gerakan sosial tidak menjadi mapan, maka akan berisiko mudah hilang.

4. *Decline* (tahap kemunduran/penurunan)

Ada lima alasan mengapa suatu gerakan sosial mengalami kemunduran, yaitu:

- a. Aktivitas suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuan;
- b. Suatu gerakan sosial mengalami kegagalan karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi;
- c. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan;
- d. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena adanya tekanan, terutama dari pihak eksternal; dan
- e. Suatu gerakan sosial mengalami kemunduran karena gerakan tersebut terbentuk ke dalam pengarusutamaan.

McCarthy mengkaji berbagai elemen yang diperlukan dalam suatu gerakan dan bagaimana proses dari elemen-elemen ini, khususnya sumberdaya dimobilisasi untuk digunakan dalam suatu gerakan (Sukmana, 2016: 157). Ada tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumberdaya tentang proses terjadinya suatu gerakan sosial, yakni sumberdaya (*resources*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan politik (*political environment*) (Pichardo dalam Sukmana, 2016: 157). McCarthy dalam Sukmana (2016: 158), mengatakan perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk dari kekuatan-kekuatan lingkungan, baik bersifat internal maupun eksternal terhadap gerakan. Faktor-faktor internal meliputi kepemimpinan, tingkat ketersediaan sumberdaya, ukuran kelompok, dan tingkat dari organisasi internal. Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari masyarakat, tingkat simpatisasi eksternal, serta jumlah dan kekuatan kelompok politik.

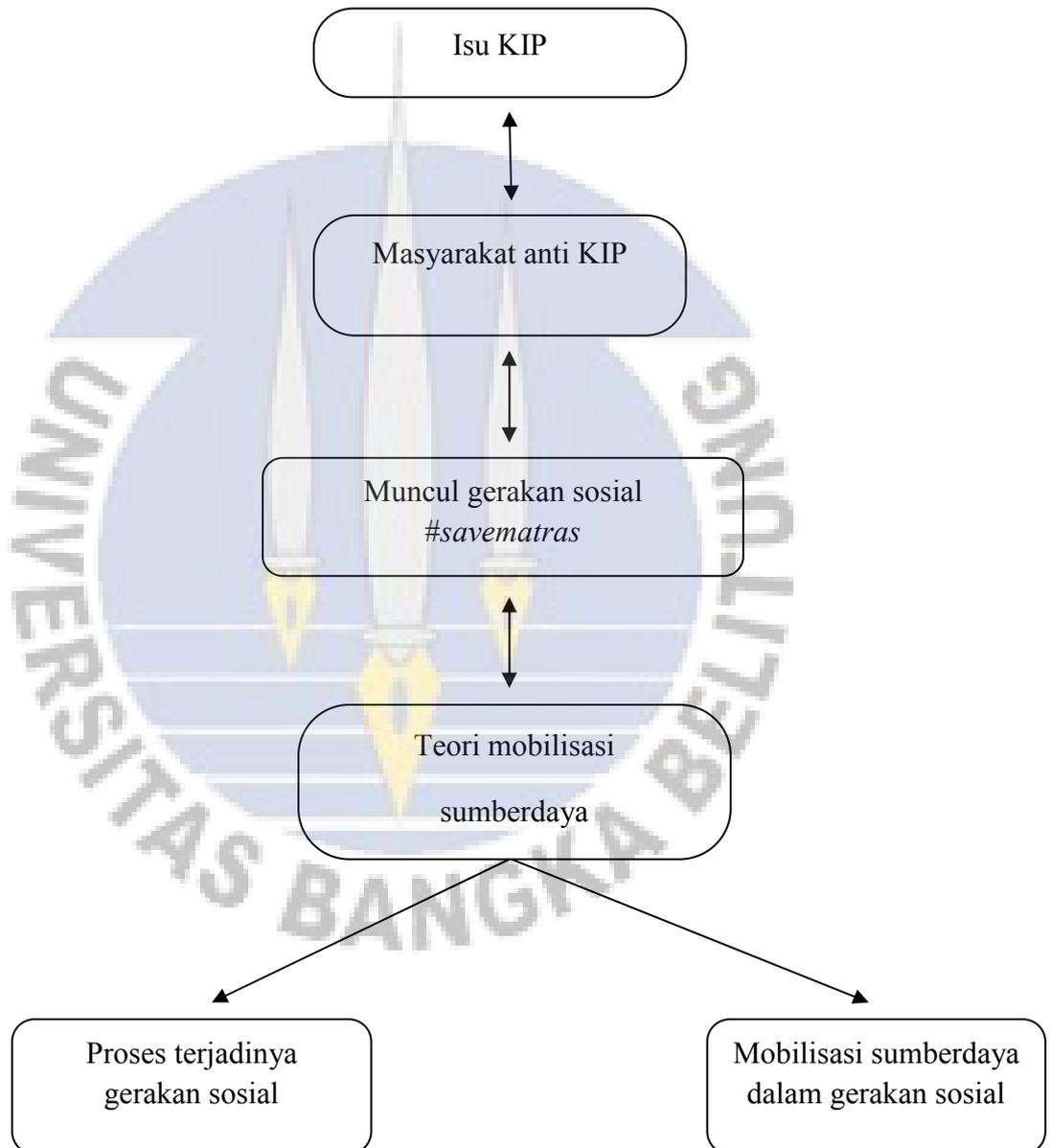
Dalam konteks gerakan sosial, terdapat lima tipe sumberdaya, yaitu: Pertama, sumberdaya moral meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal. Kedua, sumberdaya kultural adalah artefak dan produk budaya seperti seperangkat konseptual dan pengetahuan khusus yang telah dikenal secara luas, meskipun tidak harus universal. Kategori sumberdaya kultural meliputi produksi gerakan atau isu-isu penting seperti musik, literatur, majalah, koran, dan film atau video.

Ketiga, Sumberdaya organisasi sosial yang meliputi organisasi sosial yang disengaja dan sepadan. Organisasi sosial yang disengaja adalah organisasi yang dibentuk secara khusus untuk tujuan gerakan sosial lebih lanjut, sedangkan organisasi sepadan dibentuk bukan untuk tujuan gerakan, akan tetapi aktor-aktor gerakan memungkinkan untuk mendapatkan akses sumberdaya melalui organisasi ini. Keempat, sumberdaya manusia lebih nyata dan lebih mudah untuk diapresiasi dibandingkan ketiga sumberdaya diatas. Kategori sumberdaya manusia meliputi tenaga kerja, pengamanan, keterampilan, dan keahlian. Kelima, sumberdaya material yang mengkombinasikan antara modal fisik dan finansial, meliputi sumber-sumber moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan (Edwards dan McCarthy dalam Sukmana, 2016: 168).

## G. Alur Pikir Penelitian

Berikut ini adalah skema alur pikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.1 Skema Alur Pikir



Isu masuknya kapal isap produksi pada awal tahun 2015 yang lalu oleh perusahaan tambang yaitu PT. Sinar Logindo Alam (SLA) di perairan Pantai Matras membuat masyarakat di Kelurahan Matras resah. Masyarakat yang anti terhadap kapal isap produksi menolak dan melakukan gerakan agar kapal isap produksi tidak melakukan penambangan di perairan Pantai Matras. Masyarakat yang anti terhadap kapal isap produksi menamai gerakan sosial ini dengan nama gerakan *#savematras*. Gerakan *#savematras* tercetus dari ide aliansi pemuda dan mahasiswa Kabupaten Bangka beserta kumpulan nelayan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya milik McCarthy dan Zald. Teori mobilisasi sumberdaya cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial. Teori mobilisasi sumberdaya digunakan untuk mengetahui bagaimana proses gerakan sosial yang dilakukan oleh Masyarakat dalam menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras. Selain itu, keberhasilan suatu gerakan sosial juga tidak lepas dari adanya mobilisasi sumberdaya didalam gerakan sosial.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini pertama terdiri dari latar belakang. Latar belakang merupakan pintu masuk dari sebuah penelitian. Latar belakang pada penelitian ini berisikan pemaparan

permasalahan yang penulis lakukan mengenai kapal isap produksi. Kedua rumusan masalah, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian penulis yaitu bagaimana proses terjadinya gerakan dan bagaimana mobilisasi sumberdaya dalam gerakan masyarakat anti kapal isap produksi di perairan Pantai Matras. Ketiga tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya gerakan serta untuk mengetahui proses mobilisasi sumberdaya dalam melakukan gerakan anti kapal isap produksi di perairan Pantai Matras.

Keempat manfaat penelitian. Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan manfaat secara akademis didalam perkembangan ilmu sosiologi. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, serta diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan dan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya mengenai tema yang sama. Kelima tinjauan pustaka. Ada 3 hasil penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam tinjauan pustaka penelitian ini. ketiga tinjauan pustaka ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis. Keenam kerangka teoretis. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori mobilisasi sumberdaya milik McCarthy dan Zald. Ketujuh alur pikir penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Metode penelitian menjadi bab II dalam penelitian ini. Ada beberapa metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut: pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kedua lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Matras. Ketiga, yang menjadi objek penelitian ini adalah gerakan masyarakat Matras yang menolak masuknya KIP di perairan Pantai Matras.

Keempat sumber data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kelima teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keenam teknik analisa data. Ada empat teknik dalam menganalisa data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Bab III berisikan gambaran umum objek penelitian. Adapun gambaran umum penelitian ini yaitu kondisi geografis Kelurahan Matras, kondisi demografis Kelurahan Matras, sejarah pertambangan timah laut dari kapal keruk ke kapal isap di Bangka Belitung, dan profil perairan Pantai Matras.

Bab IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Ada pun sub bab yang masuk dalam bab IV ini yaitu proses gerakan sosial dalam menolak KIP, mobilisasi sumberdaya dalam menggerakkan masyarakat, resistensi terhadap gerakan sosial, dan prediksi arah gerakan sosial ke depan. Bab V penutup terdiri dari kesimpulan yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, implikasi teori, dan saran.